

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kehidupan ini serba modernisasi tidak dipungkiri bahwa semua lini kehidupan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menunjang operasional sehari-hari. Penerapan teknologi dan informasi dalam suatu organisasi juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan mempermudah melakukan pekerjaan, tidak terkecuali pemerintah juga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mempermudah mengelola keuangan. Setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur masing-masing daerahnya dan membuat kebijakan bagi daerahnya atau yang disebut dengan otonomi daerah.

Saat ini pemerintah Kabupaten Blitar telah memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mempermudah proses penyusunan, pelaporan, dan evaluasi seperti yang tertuang PP No. 56 Tahun 2005 berisi Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah. BPKP mengembangkan teknologi informasi dalam bentuk suatu aplikasi teknologi informasi yang disebut dengan SIMDA Keuangan. SIMDA Keuangan adalah bentuk pengembangan software sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis *desktop application*.

Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan di Kabupaten Blitar sejak tahun 2008 dan mengalami beberapa kali pengembangan sistem. Sistem dikembangkan seiring dengan kebijakan baru dari pemerintah yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 berisi Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan *Accrual Basis* Pada PEMDA, tentunya hal tersebut mengharuskan pengembangan baru dari BPKP dan penggunaannya untuk menyesuaikan sistem yang baru dan penerapan sepenuhnya selambat-lambatnya tahun 2015. Pemerintah daerah berkewajiban membuat APBD untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat berupa Laporan Keuangan PEMDA berisi LRA, laporan arus kas, neraca, dan CALK, sehingga dalam pelaporannya harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Untuk menyajikan laporan keuangan, pemerintah diwajibkan menghasilkan laporan keuangan berkualitas, SDM yang ahli di bidang akuntansi dan paham terhadap peraturan-peraturan akuntansi pemerintahan. Selain itu, dalam menyajikan laporan keuangan berkualitas juga diperlukan teknologi informasi yang tersistematis.

Aplikasi SIMDA Keuangan yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini adalah versi 2.7.12, penggunaannya untuk mengelola keuangan daerah dari penganggaran, penatusahaan, akuntansi sampai pelaporan serta sudah terintegrasi secara online dengan setiap SKPD. Namun dalam penerapan aplikasi SIMDA Keuangan ditemukan beberapa kendala baik dari sistem maupun sumber daya manusia. Sistem SIMDA Keuangan beberapa kali mengalami perubahan salah satunya untuk menyesuaikan kebijakan baru dari pemerintah yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 berisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan *Accrual Basis* Pada PEMDA, tentunya hal tersebut mengharuskan penggunaannya untuk menyesuaikan sistem yang baru dari *cash basis* ke *accrual basis* dan penerapan sepenuhnya selambat-

lambatnya tahun 2015. Hal inilah yang membuat para SKPD enggan untuk terus belajar dan memahami sistem yang baru.

Faktor lain yang menghambat penerapan SIMDA Keuangan adalah sumber daya manusia, yaitu SKPD sebagai penggunanya yang sering berganti posisi karena kenaikan jabatan atau faktor lain. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala BPKAD Kabupaten Blitar mencatat bahwa bagian bendahara yang intensitasnya sering berganti hal ini juga menghambat proses penginputan data dan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), karena penginputan data dalam waktu yang singkat dan perlunya pembelajaran dari pengguna dalam menginput data sehingga validitas data masih diragukan. Hal lain yang menghambat adalah antara orang lama dengan orang baru memiliki pemahaman yang berbeda saat menggunakan SIMDA Keuangan sehingga kecepatan pemahaman penggunaan SIMDA Keuangan ini juga tidak lebih baik. Hambatan-hambatan inilah yang akan mengurangi proses tercapainya keefektifan diterapkannya aplikasi SIMDA Keuangan. Untuk memastikan keefektifan penerapan aplikasi SIMDA Keuangan tercapai maka diperlukan rancangan perbaikan sehingga tujuan penerapan SIMDA Keuangan dapat tercapai.

Model TAM terdapat aspek yang dapat menjelaskan perilaku dalam hal ini *user* terhadap sistem teknologi informasi, selain itu penggunaannya untuk menguji efektivitas penerimaan teknologi informasi suatu instansi pemerintahan. Penulis menggunakan penelitian yang bersifat eksploratif dan analisa data yang digunakan secara kualitatif serta diolah secara kuantitatif.

Oleh sebab itu, penulis berinisiatif melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi SIMDA Keuangan Dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* Untuk Melihat Efektivitas Penerimaan Terhadap Teknologi Di Pemerintah Kabupaten Blitar”.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar adalah dari sistem dan sumber daya manusia. Sistem SIMDA Keuangan yang beberapa kali mengalami perubahan salah satunya untuk menyesuaikan kebijakan baru dari pemerintah yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 berisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan *Accrual Basis* Pada PEMDA, juga mengharuskan penggunaannya untuk menyesuaikan sistem yang baru dari *cash basis* ke *accrual basis* dan penerapan sepenuhnya selambat-lambatnya tahun 2015. Hal inilah yang membuat para SKPD enggan untuk terus belajar dan memahami sistem yang baru. Selain itu SKPD sebagai pengguna SIMDA Keuangan yang sering berganti posisi karena kenaikan jabatan atau faktor lain juga menghambat proses penginputan data dan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena antara orang lama dengan orang baru memiliki pemahaman yang berbeda saat menggunakan SIMDA Keuangan sehingga kecepatan pemahaman penggunaan SIMDA Keuangan ini juga tidak lebih baik. Tentunya hal tersebut juga akan berakibat pada informasi yang dihasilkan kurang relevan dan penerapan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Blitar kurang efektif.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan penulis, berikut rumusan masalah: Bagaimana Menganalisis Implementasi SIMDA Keuangan Dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* Untuk Melihat Efektivitas Penerimaan Terhadap Teknologi Di Pemerintah Kabupaten Blitar?.

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Implementasi SIMDA Keuangan Dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* Untuk Melihat Efektivitas Penerimaan Terhadap Teknologi Di Pemerintah Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Mendapatkan sebuah pelajaran baru dari permasalahan yang diteliti dan menambah ilmu baik berupa teori maupun secara praktik.

2. Bagi pemerintah

Dengan adanya analisis implementasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja.

3. Bagi pihak lain

Menjadi bahan sumber informasi, menambah wawasan dan pengetahuan khususnya SIMDA Keuangan.